

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (1987) dengan prinsip utama bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Gagasan ini berakar dari kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mencapai batasnya jika pola pertumbuhan seperti peningkatan populasi, industrialisasi, polusi, produksi pangan dan pengurangan sumber daya alam tidak berubah (Sakalasooriya, 2021). Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta ketergantungan pada bahan bakar fosil telah memicu krisis pangan dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut menggarisbawahi urgensi penerapan pembangunan berkelanjutan (Sachs et al., 2021).

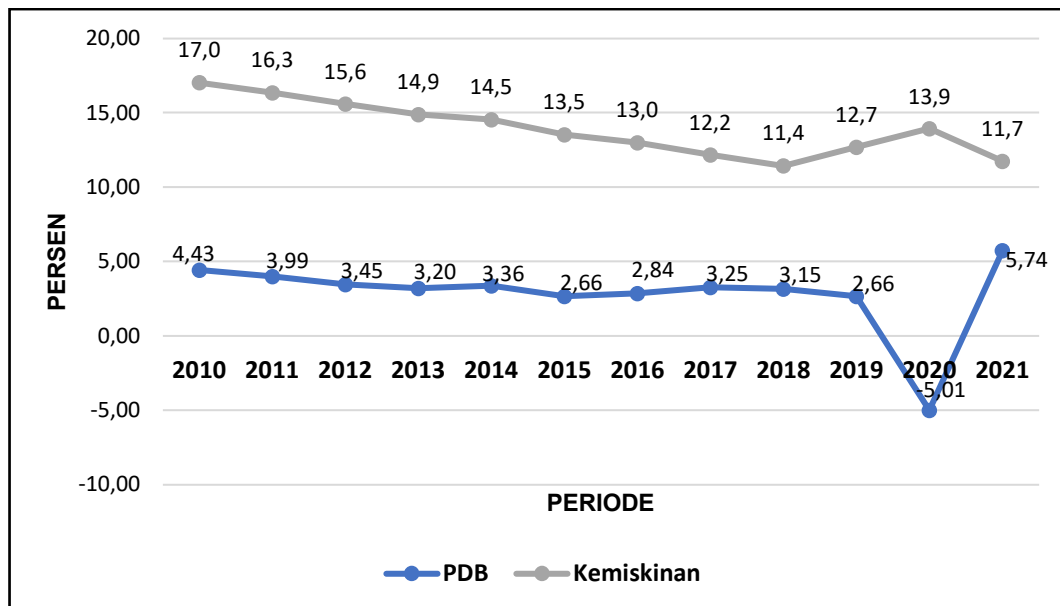
Pembangunan berkelanjutan memunculkan paradigma baru terkait sinergi antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep pertumbuhan hijau menggambarkan pembangunan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologi (*Organisation for Economic Cooperation and Development*, 2011). Lebih lanjut, *World Bank* (2012) memperkenalkan konsep pembangunan hijau inklusif untuk menekankan pentingnya inklusi sosial dalam pertumbuhan hijau. Hal ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Maka, pembangunan hijau inklusif merupakan strategi kunci untuk

mencapai pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan hijau inklusif mendapatkan perhatian yang semakin besar setelah menjadi topik utama dalam Konferensi Rio+20 pada tahun 2012. Penelitian terkait indikator, metode pengukuran dan capaian pembangunan hijau inklusif telah banyak dilakukan (Aminata et al., 2022; He & Du, 2022; Li et al., 2021; Y. Sun et al., 2020). Namun, luasnya dimensi konsep, perbedaan karakteristik serta permasalahan antarnegara menjadikan strategi pencapaiannya sangat beragam, sehingga sulit untuk diukur dan dibandingkan (*World Bank*, 2012). Berbagai organisasi dunia juga telah mengembangkan kerangka pengukuran kualitas pembangunan suatu wilayah. Namun, belum ada kesepakatan mengenai standarisasi indikator pembangunan hijau inklusif. Pengembangan strategi pencapaian pembangunan hijau inklusif juga dilakukan oleh berbagai negara dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya sinergi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan telah disepakati oleh berbagai negara di dunia. Pembangunan hijau inklusif dapat mewujudkan kesejahteraan jangka panjang (*Global Green Growth Institute*, 2017), sehingga mendorong kesadaran berbagai negara untuk mencapainya, tidak terkecuali negara berkembang. Negara berkembang mulai berkomitmen mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui kesepakatan ***United Nations Sustainable Development Summit*** yang berlangsung pada **25-27 September 2015** di Markas Besar PBB, New York. SDGs menggantikan ***Millennium Development Goals (MDGs)*** dan ditujukan untuk diimplementasikan oleh seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang dimulai tahun **2016 hingga 2030**. Namun, tantangannya adalah pola pertumbuhan ekonomi negara berkembang saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan

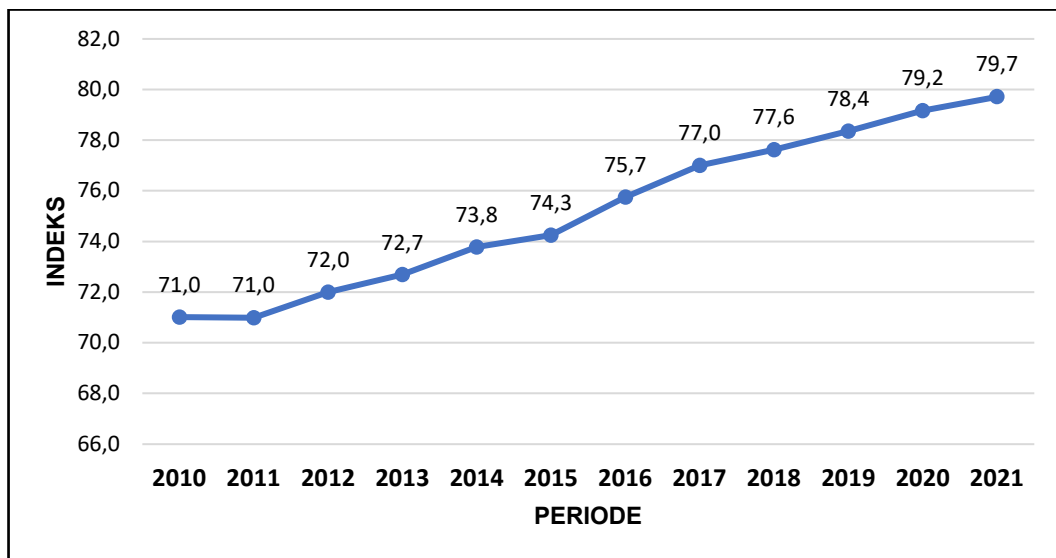
sosial dan lingkungan. Krisis energi global dan pandemi *Covid-19* turut memperparah kondisi tersebut dengan menyebabkan pelemahan perekonomian (Madni et al., 2022).



Sumber: *World Bank*, 2025

Gambar 1. 1
Perkembangan Rata-rata PDB dan Kemiskinan (%) di Negara berkembang Tahun 2010-2021

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil dalam dua dekade terakhir pasca krisis keuangan global. Perekonomian tumbuh pada angka rata-rata 2,81 persen dalam kurun waktu tahun 2010-2021. Namun, pertumbuhan yang terjadi belum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan berangsur menurun setiap tahun, namun dalam kurun waktu tersebut masih mencapai 11,4 persen pada tahun 2018. Bahkan persentasenya meningkat kembali saat pandemi Covid-19.



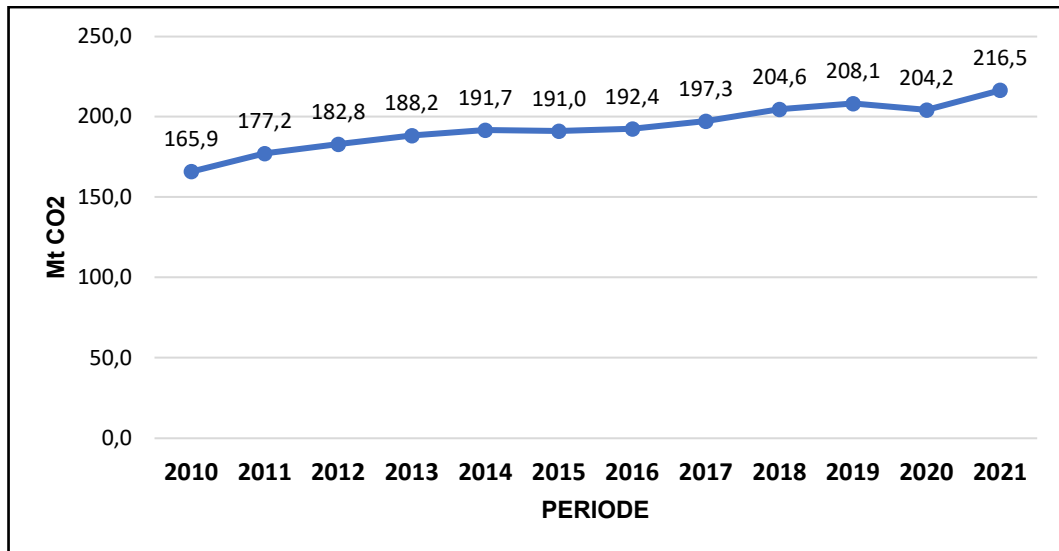
Sumber: *World Bank*, 2025

Gambar 1. 2
Perkembangan Rata-rata Ketimpangan Pendapatan di Negara berkembang
Tahun 2010-2021

Gambar 1.2 di atas menunjukkan perkembangan rata-rata ketimpangan pendapatan di negara berkembang. Dalam rentang waktu yang sama rata-rata indeks ketimpangan pendapatan sebesar 78,4 dengan kecenderungan semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang.

Permasalahan energi dan lingkungan juga menjadi tantangan di negara berkembang, bahwa seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk, kebutuhan energi terus meningkat terutama ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil yang ketersediaannya terbatas (Gabr, 2022). Seperti China sebagai penghasil emisi tertinggi, hal ini disebabkan China sangat bergantung pada batu bara untuk kebutuhan energinya (*Indonesia Mining Association*, 2025). Diikuti oleh India dengan sumber energi utama yaitu batu bara dan Rusia gas alam (Net0, 2022). Indonesia juga berkontribusi terhadap emisi karena adanya *perubahan penggunaan lahan dan pembakaran bahan bakar fosil* (Kementerian Keuangan, 2023). Gambar 1.3 di bawah menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi energi

berhubungan langsung dengan peningkatan emisi karbon. Negara yang antusias meningkatkan pertumbuhan ekonominya harus menggunakan lebih banyak energi untuk mengimbangi tingkat produksi yang lebih tinggi (Sadorsky, 2010).



Sumber: *World Bank*, 2025

Gambar 1. 3
Perkembangan Rata-rata Emisi Karbondioksida (Mt CO₂e)
di Negara berkembang Tahun 2010-2021

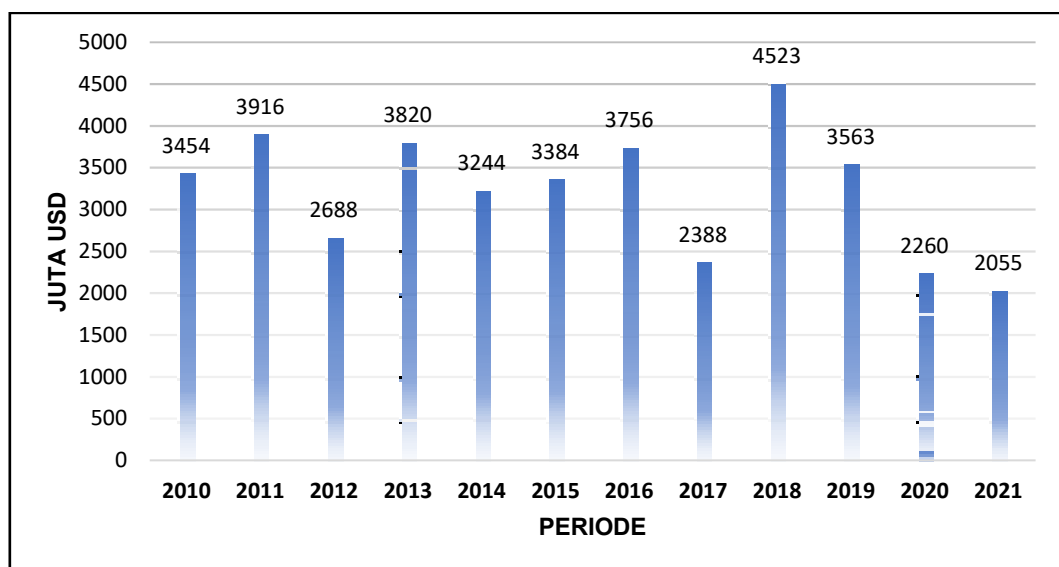
Permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menghambat tercapainya pembangunan hijau inklusif di negara berkembang perlu segera diatasi. Maka, perlu dipertimbangkan apakah *green foreign direct investments*, dapat berperan dalam mendorong pembangunan hijau inklusif. Terkait keberlanjutan lingkungan, Kang et al. (2023) melihat *green foreign direct investment* sebagai alat kebijakan yang penting untuk mencapai kelestarian lingkungan. *Green foreign direct investment* berfokus pada investasi dalam teknologi bersih seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah (Chen & Zeng, 2022). Sehingga dapat mengurangi dampak polusi serta biaya kesejahteraan akibat pertumbuhan yang tidak ramah lingkungan (Amendolagine et al., 2021).

Namun, beberapa negara berkembang mengurangi regulasi lingkungan untuk menarik FDI yakni, menciptakan keunggulan komparatif dalam industri yang berpolusi. Fenomena ini dikenal sebagai *Pollution Haven Hypothesis*, di mana relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang bertentangan dengan upaya mitigasi perubahan iklim karena hanya memindahkan sumber emisi, bukan mengurangnya (Silvia et al., 2021). Di sisi lain, *green foreign direct investment* dapat memberikan efek “*pollution halo*” yang positif, dengan membawa teknologi hijau canggih dan metode produksi ramah lingkungan ke negara tuan rumah melalui transfer teknologi, konservasi sumber daya dan produksi hijau (Khan et. al., 2021).

Terkait dengan keberlanjutan sosial ekonomi, *green foreign direct investment* sebagai bagian dari FDI secara umum adalah sebagai sumber utama arus modal yang stabil dan signifikan serta telah melampaui bantuan pembangunan pemerintah dan investasi portofolio sebagai sumber pendanaan eksternal utama bagi negara berkembang (Aprianto et al., 2020). Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan produktivitas perusahaan dalam negeri melalui transfer teknologi termasuk distributor, pelanggan dan pesaing (Crescenzi et al., 2015). Selain itu, mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan perekonomian kompleksitas (Yuldashev et al., 2023), meningkatkan daya saing perusahaan multinasional yang beroperasi di negara penerima (Agyabeng et al., 2020). meningkatkan partisipasi nilai global di negara berkembang (C. Wang et al., 2021) serta meningkatkan lapangan kerja yang berkelanjutan dan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan (Klein et al., 2001). Sedangkan terkait infrastruktur, *green foreign direct investment* dapat mendukung keberlanjutan lingkungan melalui

peningkatan proporsi investasi hijau berupa produksi dan distribusi peralatan energi terbarukan (Kardos, 2014).

Gambar 1.4 di bawah menunjukkan perkembangan rata-rata *green foreign direct investment* di negara berkembang dari tahun 2010 sampai 2021. Pada masing-masing tahun mengalami fluktuasi, nilai *green foreign direct investment* tahun 2010 sebesar 3454 juta Dollar Amerika Serikat sampai tahun 2021 sebesar 2055 juta Dollar Amerika Serikat. Bagi negara berkembang peningkatan FDI, baik *green foreign direct investment* maupun jenis FDI lainnya sangat penting, karena negara berkembang cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diimbangi oleh modal yang memadai (Budiono & Purba, 2023). Meskipun demikian, mayoritas perusahaan *green foreign direct investment* di negara-negara ini cukup dibatasi dan menghadapi keterbatasan sumber daya, yang membuat industri menjadi kurang kompetitif.



Sumber: UNCTAD, 2025

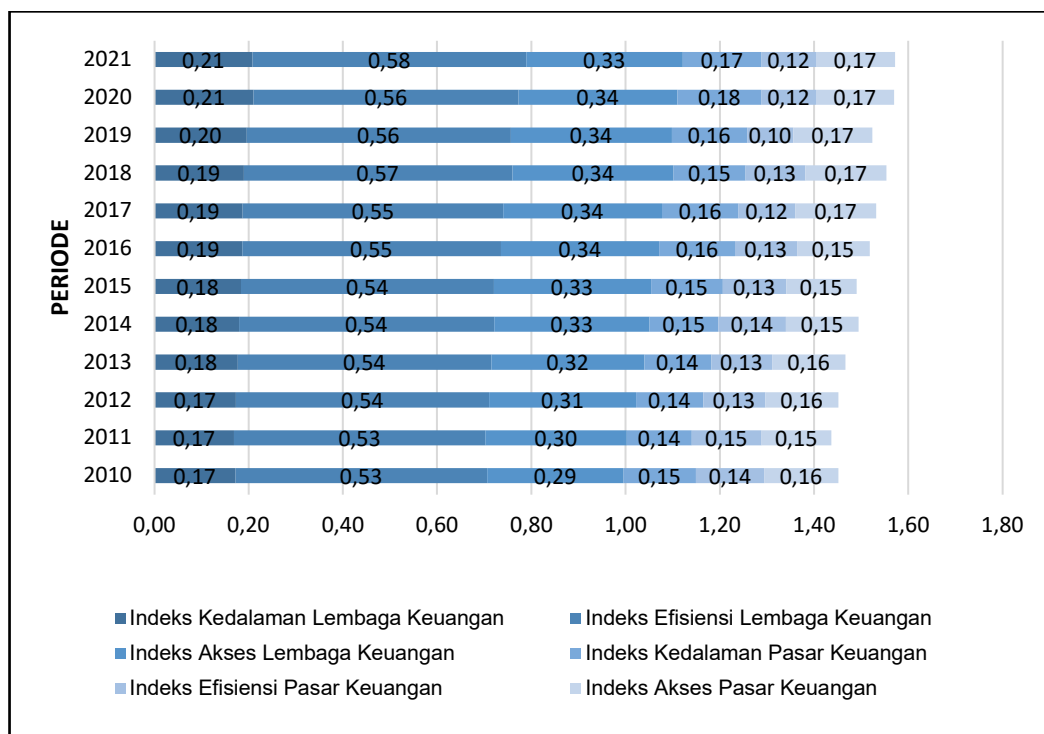
Gambar 1. 4
Perkembangan Rata-rata *Green Foreign Direct Investment* (Juta USD)
Negara berkembang Tahun 2010-2021

Isu pembangunan hijau inklusif di negara berkembang tidak hanya dilihat melalui *green foreign direct investments*, tetapi juga apakah pengembangan

keuangan dapat mendorong pembangunan hijau inklusif. Pengembangan keuangan merujuk pada proses pertumbuhan dan perbaikan sektor keuangan suatu negara yang mencakup lembaga keuangan dan pasar keuangan (Nguyen & Pham, 2021). Hubungan pengembangan keuangan dengan keberlanjutan lingkungan mengkonfirmasi bahwa pengembangan keuangan mendukung keberlanjutan lingkungan karena pengembangan keuangan memungkinkan industri untuk mengakses jenis mesin canggih yang ramah lingkungan (Adams & Klobodu, 2018). Selain itu, pengembangan sektor keuangan dapat meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya mempengaruhi kualitas lingkungan menjadi lebih baik (Frankel & Romer, 1999).

Selain itu, pengembangan keuangan dikaitkan dengan emisi karbon yang tinggi. Pengembangan keuangan memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mendapatkan modal untuk ekspansi sehingga perusahaan dapat memproduksi lebih banyak produk, mempekerjakan lebih banyak pekerja dan mendapatkan lebih banyak peralatan yang mengarah pada peningkatan emisi karbon. Kemudahan dalam memperoleh akses pendanaan juga memicu konsumen untuk membeli *durable goods* yang rawan energi dan memicu permasalahan lingkungan (Baloch et al., 2019). Lebih jauh lagi, kinerja pasar keuangan yang baik sering digunakan untuk mewakili kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan lebih banyak kepercayaan kepada produsen dan konsumen dalam kegiatan produksi dan konsumsi mereka yang menyebabkan lebih banyak konsumsi energi dan dengan demikian emisi karbon meningkat (Jiang & Ma, 2019).

Terkait dengan keberlanjutan sosial ekonomi, bukti empiris mengungkapkan bahwa pengembangan keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang (Estrada et al., 2010). Pengembangan keuangan menyediakan akses yang lebih luas terhadap modal, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Akses ini membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas ekonomi. Serta mengurangi ketimpangan melalui akses keuangan yang adil, dengan kata lain peningkatan pengembangan keuangan akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang nantinya akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan memperluas akses keuangan bagi kelompok miskin dan rentan, memfasilitasi manajemen risiko dengan mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan (Restulillah, 2020).



Sumber: *International Monetary Fund*, 2025

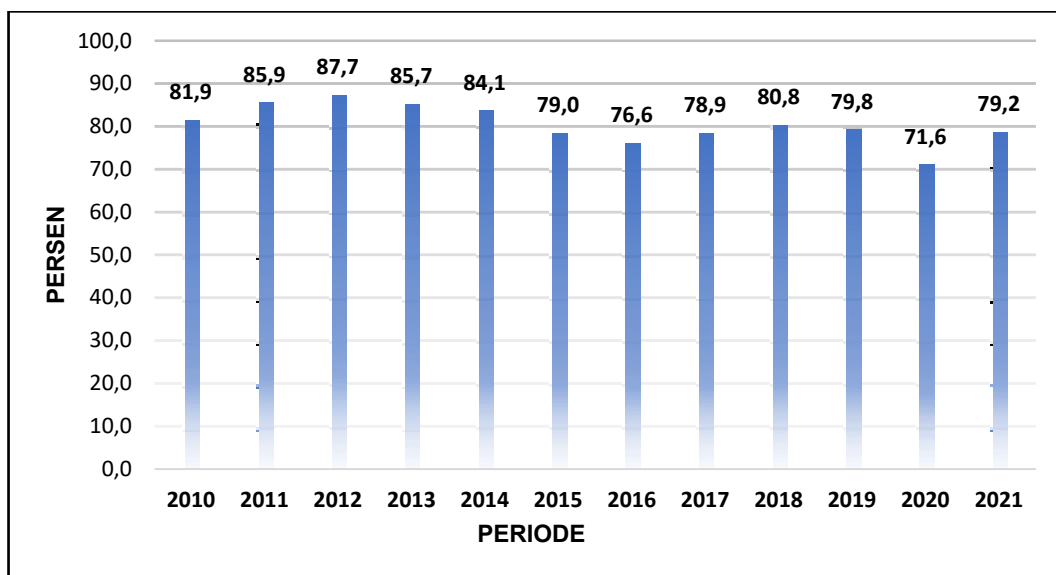
Gambar 1. 5
Perkembangan Rata-rata Sub-Indeks Pengembangan Keuangan
di Negara berkembang Tahun 2010-2021

Terdapat enam sub-indeks pengembangan keuangan berdasarkan *International Monetary Fund*. Enam sub-indeks pengembangan keuangan beserta data dan statistik setiap tahun di negara berkembang dapat ditunjukkan pada gambar 1.5 di atas. Sub-indeks tersebut antara lain, indeks kedalaman lembaga keuangan, indeks efisiensi lembaga keuangan, indeks akses lembaga keuangan, indeks kedalaman pasar keuangan, indeks efisiensi pasar keuangan dan indeks akses pasar keuangan.

Gambar 1.5 di atas menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata sub-indeks pengembangan keuangan tertinggi di negara berkembang adalah indeks efisiensi lembaga keuangan dan akses lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan inklusi keuangan. Sedangkan Indeks efisiensi pasar keuangan menunjukkan indeks terendah dalam sub-indeks pengembangan keuangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengembangan instrumen keuangan yang mendukung investasi hijau dan inklusif, sehingga pasar keuangan kurang efisien dalam mengalokasikan dana ke sektor berkelanjutan. Pengembangan keuangan merupakan hal yang perlu dibahas karena telah mempercepat aliran elemen modal, mengumpulkan bakat, teknologi dan sumber daya lainnya, serta mengakibatkan pembangunan ekonomi menembus batasan geografi dan lingkungan (Elfaki et al., 2021).

Isu pembangunan hijau inklusif tidak hanya diteliti pada *green foreign direct investment* dan pengembangan keuangan, tetapi juga pada keterbukaan perdagangan. Menurut Antweiler et al. (2001), keterbukaan perdagangan mempengaruhi lingkungan melalui tiga efek yakni: skala, teknik dan komposisi. Efek skala menunjukkan bahwa ekspansi pasar akibat perdagangan meningkatkan aktivitas ekonomi, yang berujung pada peningkatan penggunaan

bahan bakar fosil dan emisi karbon, termasuk dari transportasi lintas batas (Mgbemene et al., 2016). Efek teknik menggambarkan penurunan polutan per unit output seiring dengan transfer teknologi ramah lingkungan dan regulasi ketat akibat meningkatnya pendapatan dan kesadaran lingkungan. Sementara itu, efek komposisi menunjukkan perubahan struktur industri berdasarkan keunggulan komparatif (Korves et al., 2011). Keterbukaan perdagangan memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi dengan perluasan pasar domestik, industrialisasi yang berfokus pada ekspor, memperoleh teknologi dan meningkatkan hubungan perdagangan bilateral. Ekspansi ekonomi berarti kemungkinan produksi yang lebih tinggi, optimalisasi sumber daya melalui realokasi sumber daya ekonomi yang langka dan pengembangan kewirausahaan dalam perekonomian (Sadorsky, 2012).



Sumber: *World Bank*, 2025

Gambar 1.6
Perkembangan Rata-rata Keterbukaan Perdagangan
di Negara berkembang (2010-2021)

Gambar 1.6 di atas menunjukkan perkembangan rata-rata keterbukaan perdagangan di negara berkembang dari tahun 2010 sampai 2021. Pada masing-

masing tahun mengalami fluktuasi, persentase keterbukaan perdagangan tahun 2010 sebesar 81,9 persen sampai tahun 2021 sebesar 79,2 persen. Dalam kegiatan ekonomi, jika pasar terbuka untuk perdagangan dan memproduksi produk pada tingkat optimal maka rumah produksi harus tetap menjaga kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan biaya dan manfaat sosial (Ghani, 2012). Namun, bersama dengan biaya swasta, hal ini tergantung pada kebijakan negara tentang biaya sosial dan kegagalan pasar, maka akan terjadi disparitas pendapatan di antara ekonomi, yang akan menyebabkan peningkatan tingkat polusi dan kerusakan lingkungan.

Isu *green foreign direct investments*, pengembangan keuangan dan keterbukaan perdagangan yang diasumsikan dapat mendorong pembangunan hijau inklusif telah dibahas oleh beberapa peneliti. Menurut penelitian Famanta et al. (2024) menyatakan bahwa *green foreign direct investment* mendorong keberlanjutan lingkungan di sebagian besar wilayah, kecuali Karibia yang menunjukkan hubungan negatif karena dipengaruhi oleh faktor korupsi dan ketidakstabilan politik. Penelitian Nhuong et al. (2024) menyatakan bahwa hubungan *green foreign direct investment* dan ekonomi berkelanjutan positif dan signifikan. Artinya masuknya *green foreign direct investment* sangat layak ditingkatkan untuk mendorong pembangunan hijau inklusif disertai dengan pengelolaan yang tepat.

Hubungan antara pengembangan keuangan dan pembangunan hijau inklusif telah dibahas oleh beberapa peneliti. Menurut Ahmed et al. (2022) menyatakan bahwa dampak pengembangan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan dampak yang positif. Sedangkan, penelitian oleh Pei et

al. (2023) menyatakan bahwa pengembangan keuangan berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Begitupun juga pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pembangunan hijau inklusif telah dibahas oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian oleh Sheikh et al. (2020) menyatakan dampak keterbukaan perdagangan terhadap pembangunan berkelanjutan memberikan dampak negatif. Sedangkan menurut Stojkoski et al. (2023), keterbukaan perdagangan berdampak positif. Dampak positif ini terjadi karena suatu negara telah mampu mengadopsi metode produksi yang lebih bersih yang memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga dapat mendorong pembangunan hijau inklusif

Selain dipengaruhi oleh *green foreign direct investments*, pengembangan keuangan dan keterbukaan perdagangan, pembangunan hijau inklusif juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel ini merupakan variabel kontrol dari artikel pendukung penelitian. Pertama, nilai tukar digunakan dalam penelitian ini karena nilai tukar yang stabil dapat mendorong investasi dalam teknologi ramah lingkungan, karena perusahaan lebih percaya diri dalam merencanakan investasi jangka panjang (Ariff & Zarei, 2018). Kedua, korupsi digunakan karena korupsi dapat mengurangi efektivitas regulasi lingkungan dengan memfasilitasi pelanggaran hukum oleh perusahaan-perusahaan yang ingin menghindari biaya lingkungan (Ferré, 2018). Ketiga, inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi, termasuk di sektor hijau (Margareta., 2024). Ketika tingkat inflasi meningkat, biaya modal untuk proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi insentif bagi investor untuk berpartisipasi dalam sektor ini. Dan urbanisasi dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan akses

ke teknologi ramah lingkungan, tetapi tanpa perencanaan yang baik, dapat memperburuk ketimpangan dan degradasi lingkungan (Restulillah, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat diketahui terdapat kesenjangan pada penelitian Ahmed et al. (2022) dan Pei et. al. (2023) yang termasuk pada kategori *evidence gap*, di mana terdapat perbedaan dalam hasil temuan seperti pada penelitian pengembangan keuangan sehingga hubungan antara pengembangan keuangan dan pembangunan hijau inklusif belum dijelaskan dengan lengkap. Maka, ada beberapa *novelty* penelitian yang ditawarkan pada penelitian ini. Pertama, indeks pengembangan keuangan lebih dis-agregat dengan menggunakan indeks kedalaman lembaga keuangan, indeks efisiensi lembaga keuangan, indeks akses lembaga keuangan, indeks kedalaman pasar keuangan, indeks efisiensi pasar keuangan dan indeks akses pasar keuangan sebagai *proxy* indeks pengembangan keuangan. Kedua, obyek yang digunakan adalah 122 negara berkembang. Ketiga, menambahkan variabel kontrol berupa nilai tukar, korupsi dan inflasi dalam satu model dan variabel urbanisasi digunakan untuk menghitung model *robustness test*. Keempat, penelitian ini menggunakan tahun saat terjadi krisis ekonomi global di mana banyak negara yang terdampak termasuk negara berkembang.

Uraian sebelumnya memperoleh inti permasalahan yaitu pembangunan hijau inklusif telah menjadi perhatian utama semua negara dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam hal ini negara berkembang masih menghadapi tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama pasca krisis keuangan global. Pertumbuhan ekonomi yang stabil belum mampu mengatasi permasalahan sosial, sementara ketergantungan pada energi dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Dalam hal ini *green foreign direct investment*

dapat membawa teknologi hijau dan investasi berkelanjutan, tetapi juga berisiko meningkatkan polusi jika tidak dikelola dengan baik. Pengembangan keuangan dapat mempercepat inovasi hijau, namun juga mendorong ekspansi industri dan konsumsi masyarakat akan energi yang berpotensi meningkatkan emisi karbon. Keterbukaan perdagangan dapat mempercepat adopsi teknologi hijau, tetapi juga berisiko memperburuk ketimpangan dan polusi. Jadi, hubungan antara ketiga faktor tersebut masih menjadi perdebatan serta belum adanya kesepakatan secara global mengenai standar pengukuran pembangunan hijau inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana capaian pembangunan hijau inklusif di negara berkembang?
2. Apakah *green foreign direct investment*, sub-indeks pengembangan keuangan dan keterbukaan perdagangan dapat mendorong pembangunan hijau inklusif di negara berkembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menghitung dan menganalisis capaian pembangunan hijau inklusif di negara berkembang.
2. Menguji dan menganalisis *green foreign direct investment*, sub-indeks pengembangan keuangan dan keterbukaan perdagangan dalam mendorong pembangunan hijau inklusif di negara berkembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang pengaruh *green foreign direct investment*, sub-indeks pengembangan keuangan dan keterbukaan perdagangan terhadap

pembangunan hijau inklusif. Serta memberikan gambaran dan literatur bagi pembaca khususnya dalam bidang ekonomi moneter.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, investor dan organisasi internasional dalam mengevaluasi capaian pembangunan hijau inklusif dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mendorong investasi, sektor keuangan dan perdagangan sehingga dapat mendorong pembangunan hijau inklusif.